

Pengaruh Manajemen Program Keluarga Berencana dan Kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana Terhadap Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Wilayah III Kabupaten Garut

Suhartini¹, Gugun Geusan Akbar², Aceng Ulumudin³

^{1, 2, 3}Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Garut

¹24091121004@pasca.uniga.ac.id

²gugun.geusanakbar@uniga.ac.id

³aceng.ulumudin@uniga.ac.id

Abstrak

Penelitian yang berpusat pada wilayah Kabupaten Garut secara khusus di wilayah III, menggali dan menyoroti isu efektivitas capaian program keluarga berencana. Di tengah belum optimalnya efektivitas, dua poin yang menjadi indikator utama adalah manajemen lebih lanjut dari program keluarga berencana serta kinerja para petugas lapangan yang terlibat langsung. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan spesifik. Tiga hal yang menjadi pusat adalah analisis terperinci terhadap manajemen program, evaluasi kinerja dari para petugas di lapangan, dan tentu saja penilaian atas efektivitas capaian dari program keluarga berencana di wilayah Kabupaten Garut III. Untuk memberikan gambaran yang akurat dan jelas, penelitian mendalam ini melibatkan metode analisis statistik deskriptif dengan model analisis jalur atau yang sering disebut path analysis. Demi menjaga representasi dari populasi, responden yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 306 orang. Sementara itu, 75 dari jumlah tersebut secara acak dipilih sebagai sampel menggunakan teknik simple random sampling. Hasil-hasil yang didapatkan dari analisis data dan penelitian ini merangkum bahwa kinerja positif kerja tercapai berasal dari manajemen program keluarga berencana dan kinerja petugas lapangan. Sejumlah temuan yang dicatat dari pengamatan langsung di lapangan antara lain berhubungan dengan target kerja, mendukung kemampuan-kemampuan dari berbagai aspek yang berbeda, dan juga kemampuan berkarya para petugas lapangan di dalam program. Sejumlah masalah juga ditengarai, khususnya terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia yang memadai.

Kata Kunci: Kinerja Petugas Lapangan, Manajemen, Program Keluarga Berencana.

1. Pendahuluan

Membentuk keluarga yang optimal dalam setting lingkungan yang sehat merupakan suatu upaya penting. Ini harus diberikan prioritas sebab keluarga adalah elemen fundamental serta unit sosio-ekonomi terkecil dalam suatu komunitas. Keluarga memiliki sejumlah peran penting yang tak dapat digantikan oleh institusi lain. Membentuk keluarga optimal akan menciptakan masyarakat dan negara yang berkualitas. Salah satu cara untuk menciptakan keluarga optimal adalah melalui program perencanaan keluarga.

Sesuai dengan UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Populasi dan Pembangunan Keluarga di Indonesia, keluarga - yaitu dasar keberadaan kita, terus tumbuh dan berkembang. 'Perencanaan keluarga,' seperti yang telah didefinisikan, memberi kita kemampuan untuk mengatur kelahiran, mengatur jarak antar kelahiran, dan mengoptimalkan usia ideal untuk menyambut anak baru ke dalam kehidupan kita. Namun, perencanaan keluarga tidak hanya tentang aspek-aspek eksplisit ini itu jauh lebih luas dan lebih dalam.

Dalam konteks strategi nasional untuk periode 2005-2009, misi kerangka kerja yang telah ditetapkan adalah untuk mendukung setiap keluarga di tanah air kita, Indonesia, untuk dapat meraih gagasan anak ideal, seorang anak yang berkualitas, memiliki kesehatan prima, dididik dengan baik, sejahtera, memiliki ketahanan hidup, dan juga hak reproduksi yang dijamin.

Pada taraf operasional, mekanisme pelaksanaan program Perencanaan Keluarga menunjukkan tanda-tanda stagnasi. Entitas yang bertindak sebagai pelaksana, penyelenggara atau pendorong implementasi program Perencanaan Keluarga pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, tampaknya kehilangan efektivitas operasionalnya. Hal ini dapat diinterpretasikan dari beberapa indikator berikut:

- a. Presentase laporan yang diajukan oleh manajer program relatif rendah, hanya 30% dari 5 kecamatan.
- b. Populasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum tergabung dalam program perencanaan keluarga mencapai 60% dari total 5235 pasangan.
- c. Partisipasi masyarakat terhadap program perencanaan keluarga belum optimal, tercermin pada klasifikasi perilaku masyarakat pedesaan (IMP).
- d. Manajer program perencanaan keluarga, yang seharusnya bertindak sebagai koordinator pada tingkat operasional, belum menjalankan fungsi dan tugasnya sepenuhnya.

Dalam konteks ini, penting untuk segera memulai perbaikan dan peningkatan performa pelaksana Program Perencanaan Keluarga. Pemahaman mendalam dan adaptasi terhadap tugas, fungsi dan peran strategis dalam implementasi program perencanaan keluarga akan sangat menunjang efektivitas dan efisiensi program tersebut. Ini akan membentuk pondasi kuat untuk mencapai tujuan dari Program Perencanaan Keluarga Nasional.

Pada tingkat lini yang paling terkena dampak, hasil upaya Manajer Program Perencanaan Keluarga belum mencapai optimum, mengingat latar belakang dari perspektif pendidikan dan status kerja mereka. Mayoritas Manajer Program Perencanaan Keluarga memiliki pendidikan SMP dan SMA, dan dari 63 individu, hanya 2 yang memiliki pendidikan S1, dan status pekerjaan manajer program tersebut juga berbeda-beda. Seorang Manajer Program Perencanaan Keluarga adalah personel lapangan yang wajib bertanggung jawab dalam menjalankan dan memperluas Program Kesejahteraan Keluarga dan Perencanaan Keluarga, baik di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan tertentu. Manajer Program Perencanaan Keluarga adalah pejabat pemerintah yang menjadi titik krusial dalam implementasi pembangunan dalam skop Program Perencanaan Keluarga, karena mereka memiliki peran dan tanggung jawab sebagai pelaksana, pengelola, dan pendorong dalam pelaksanaan Program Perencanaan Keluarga Nasional di tingkat kecamatan, desa, atau kelurahan, yang dijalankan melalui berbagai fungsi dan tugas.

Karena itu, Pemda Kabupaten Garut berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penataan terhadap aparatur negara yang bersih, jujur, berwibawa, dan memiliki keahlian serta keterampilan dalam menjalankan tugas. Pelaksanaan Program Perencanaan Keluarga Nasional harus selalu

mempertimbangkan faktor yang berkaitan dengan hak reproduksi, yang merupakan integral dari hak asasi manusia, dan juga membahas faktor yang berkaitan dengan aspek demografi.

Program Nasional Keluarga Berencana, sebagai elemen esensial dalam agenda pembangunan, membutuhkan kontribusi dari berbagai faktor. Salah satu faktor penting adalah dukungan manajerial yang cakap, yang mampu mengkoordinasikan program ini agar dapat mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan. Untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien, perencanaan harus dilakukan dengan teliti dan diimplementasikan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi petugas pengelola dalam meningkatkan performa kerja mereka.

Kinerja pengelola dalam program Keluarga Berencana memegang peran penting dalam perbaikan program dan peningkatan fungsi tenaga kerja di lapangan. Revitalisasi kinerja tenaga kerja lapangan ini sangat kritis, mengingat bahwa keberhasilan program ini di masa lampau sangat bergantung pada tenaga kerja lapangan dalam mendorong program pembangunan di front line. Selain itu, adanya profesional lain seperti bidan, dokter, juga sangat penting. Untuk mencapai puncak keberhasilan dalam Program Keluarga Berencana, adalah penting untuk memiliki dedikasi dan adanya kekuatan kerja yang benar-benar kompeten, khususnya mereka yang bertanggung jawab dalam menjalankan program ini. Dengan demikian, pengemban peran dalam Program Keluarga Berencana di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan makin dituntut untuk mampu berfungsi dalam peran pemerintahan yang lebih profesional. Ini bukan hanya berkaitan dengan penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Nasional itu sendiri, tetapi juga melibatkan aspek lain dari pembangunan regional yang ditugaskan oleh pemerintah daerah.

Pelaksanaan program perencanaan keluarga menunjukkan bukti konkrit dari manfaatnya, ditandai dengan peningkatan kesejahteraan dan potensi ibu serta anak-anak. Hal ini didukung oleh data dari World Health Organization (WHO) yang mengungkapkan bahwa angka kematian ibu dapat diturunkan hingga sepertiga jika wanita diberi kebebasan untuk mengendalikan kehamilannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa perencanaan keluarga memiliki dampak luar biasa untuk memberi ibu kesempatan meraih potensi mereka sepenuhnya dan mendukung perkembangan anak yang cerdas dan sehat melalui nutrisi dan perawatan yang baik (BKKBN online, 19 April 2009).

Program perencanaan keluarga juga memainkan peran penting dalam memutus rantai kemiskinan intergenerasional (Syarief, 19 Juni 2009). Menurut pendapat Wakil Presiden, apabila implementasi program perencanaan keluarga gagal, ini bisa berakibat pada pertumbuhan populasi yang tidak terkendali, yang berujung pada berbagai masalah sosial termasuk pengangguran, kemiskinan, dan kekurangan pangan (BKKBN online, 27 Februari 2010).

Bertepatan dengan gerakan otonomi daerah pada 2004, pemerintah daerah Kabupaten dan Kota diberikan tanggung jawab dan kewenangan untuk mengoperasionalisasi program keluarga berencana, termasuk alokasi anggaran dan sumber daya manusia. Namun, perjalanan awal ini tampak berat; sebagian besar dari mereka menunjukkan keterlibatan yang kurang. Statistik menunjukkan bahwa daripada menyediakan lembaga khusus yang membentuk dan melaksanakan program-program ini, banyak kabupaten dan kota memilih opsi yang lain, dengan mencoba mengintegrasikan fungsi-fungsi ini dengan badan atau dinas lainnya.

Program keluarga berencana merupakan layanan kesehatan utama bagi kaum perempuan usia subur. Fokus program ini mencakup pemilihan alat kontrasepsi, layanan aborsi yang aman (jika diperlukan untuk kesehatan ibu), dan kesehatan ibu secara umum. Pelayanan tambahan mencakup

pencegahan penyakit menular seksual termasuk AIDS, program keluarga berencana untuk ibu menyusui, perawatan pasca-aborsi, diagnosis dan pengobatan infeksi saluran reproduksi, layanan pengaduan mengenai kesuburan, dan pap-smear bagi konsumen program ini. Program ini juga dapat meningkatkan hasrat, kebutuhan, dan melindungi kesehatan peserta program keluarga berencana, serta mengurangi putusnya peserta program ini karena menanggulangi efek samping. Petugas program ini perlu memahami bagaimana cara kerja dan efek samping dari program ini. Layanan pengaduan konsumen merupakan elemen penting untuk melengkapi layanan program keluarga berencana yang berkualitas dan dapat membantu menyesuaikan keinginan konsumen dengan tujuan program ini.

Pertumbuhan penduduk yang cepat bisa menjadi isu serius jika tidak segera ditangani. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak terkontrol akan mempengaruhi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi di Kota Garut, yang mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya dan menjadi kota dengan jumlah penduduk yang paling tinggi di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Garut Tahun 2016- 2021

Tahun	Jumlah Penduduk
2016	1.352.136
2017	1.369.606
2018	1.408.072
2019	1.449.401
2020	1.469.601
2021	1.489.011

Sumber: Data BPS Kota Garut Tahun 2021

Dari Tabel 1, kita bisa melihat bahwa populasi Kota Garut terus bertambah setiap tahun. Pada 2016, populasi mencapai 1.352.136 orang dan bertambah menjadi 1.369.606 pada 2017. Pada 2018, tercatat 1.408.072 orang dan meningkat lagi menjadi 1.449.401 pada 2019. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2018-2019 adalah 1,41%, dan pada tahun 2020, jumlah populasi meningkat menjadi 1.469.601 dengan laju pertumbuhan 1.39% pada periode 2018-2020. Walaupun demikian, laju pertumbuhan masih tinggi dan memerlukan upaya lebih untuk ditekan.

Dalam menanggapi peningkatan populasi yang pesat, pemerintah kota Garut telah berani mengambil langkah besar dengan menerapkan program Keluarga Berencana. Mereka, yang bekerja di bawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Garut dan BKKBN Provinsi Jawa Barat, berpandangan ke depan dengan tujuan yang jelas: meraih perkembangan yang bertumpu pada nilai-nilai manusia dan memotivasi masyarakat untuk menciptakan keluarga yang kecil tapi sejahtera dan penuh kebahagiaan.

Tabel 2. Jumlah Peserta Keluarga Berencana Aktif di Kota Garut Tahun 2016- 2021

Tahun	Jumlah Penduduk
2016	125.370
2017	113.892
2018	123.897
2019	121.892
2020	129.265
2021	132.222

Sumber: BPS Jawa Barat tahun 2021

Menurut Tabel 1.2, terdapat 125.370 individu yang aktif dalam program keluarga berencana di Kota Garut pada tahun 2016. Angka ini kemudian menurun pada tahun 2017 dan menjadi 113.892 jiwa, namun naik kembali pada tahun 2018 jadi 123.897 jiwa. Pada tahun 2019 ada sedikit penurunan menjadi 121.892 jiwa, namun pada tahun 2020, jumlah individu yang berpartisipasi aktif dalam program keluarga berencana meningkat dan mencapai angka tertinggi, 129.165 jiwa.

Analisis terhadap data ini menunjukkan bahwa jumlah peserta aktif dalam program keluarga berencana di Kota Garut mengalami fluktuasi. Namun, di 2020, data menunjukkan kenaikan jumlah peserta yang signifikan hingga 129.165 jiwa. Ini dapat dijadikan indikator bahwa upaya pemerintah dalam pengendalian laju kelahiran terus berjalan. Melihat pertumbuhan penduduk yang semakin pesat di Kota Garut, kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Garut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pertimbangan Efek Manajemen Program Keluarga Berencana dan Kinerja Petugas Lapangan Terhadap Efektivitas Capaian Program Keluarga Berencana di Wilayah III Kabupaten Garut".

Begitupun, peningkatan optimal dari kegiatan keluarga berencana belum sepenuhnya dicapai, terutama jika mengingat latar belakang pendidikan dan status kepegawaian Pengelola Program Keluarga Berencana. Sebagian besar dari mereka hanya memiliki latar belakang pendidikan SMP dan SLTA. Dari 63 pengelola Program Keluarga Berencana di Wilayah III Kabupaten Garut, hanya dua orang yang memiliki latar belakang pendidikan S1. Selain itu, status kepegawaian pengelola program ini juga beragam.

Mengacu pada konteks di atas, peneliti menduga bahwa efektivitas pencapaian program keluarga berencana di Wilayah III Kabupaten Garut bisa ditingkatkan melalui peningkatan manajemen program dan kinerja petugas lapangan. Kemampuan manajemen dan kinerja petugas lapangan yang lebih baik bisa mengoptimalkan hasil pencapaian program keluarga berencana. Seiring peningkatan tersebut, juga perlu ada peningkatan motivasi dan kinerja petugas lapangan untuk mencapai tujuan yang lebih efektif. Untuk memverifikasi dasar kecurigaan ini, peneliti berencana untuk melakukan penelitian langsung terhadap kinerja petugas lapangan keluarga berencana di Wilayah III Kabupaten Garut.

Berdasarkan informasi ini, peneliti merumuskan pernyataan masalah: "Efektivitas pencapaian program keluarga berencana di Wilayah III Kabupaten Garut belum optimal, kemungkinannya adalah karena manajemen program dan kinerja petugas lapangan yang belum maksimal."

2. Metodologi

Untuk membantu pemahaman, penelitian ini dibangun menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah kerangka kerja penelitian yang mencakup subjek, cara pengumpulan data seperti survei, observasi, dan interaksi langsung, serta prosedur pengolahan data.

Mengingat tujuan penelitian yang ingin dicapai, kita menerapkan dua jenis penelitian: penelitian deskriptif dan penelitian verifikatif. Kedua metode tersebut digunakan untuk memverifikasi informasi dari survei melalui konfirmasi langsung di lapangan. Penelitian deskriptif memberikan penggambaran atau deskripsi spesifik dari variabel tertentu, dalam hal ini adalah Program Manajemen Keluarga Berencana, kinerja petugas lapangan Keluarga Berencana di Wilayah III Kabupaten Garut, dan efektivitas pencapaian program tersebut. Sementara penelitian verifikatif

bertujuan untuk memvalidasi hubungan antar variabel melalui tes hipotesis berdasarkan data lapangan.

Penelitian ini juga menggunakan metode survey deskriptif dan survey eksplanatori dengan petugas lapangan keluarga berencana sebagai unit analisis. Survey deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan mendapatkan gambaran detail dari topik yang diteliti. Metode survey eksplanatori fokus mencari pengetahuan tentang karakteristik variabel melalui pengujian beberapa contoh(sampel).

3. Hasil dan Pembahasan

Sejarah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut awalnya tidak bisa dipisahkan dengan tahapan perkembangan Program KB Nasional BKKBN. Karena pada awalnya program KB dicetuskan dan diprakarsai oleh para pemerhati dan peminat kependudukan dan Keluarga Berencana di Indonesia.

Secara ringkas dan singkat di bawah ini di uraikan tahapan pelaksanaan Program KB sebagai berikut:

a. Periode Sebelum 1970

Inisiatif pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Indonesia dimulai oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang didirikan pada tanggal 23 Desember 1957. Dilaksanakannya pelayanan KB pada waktu itu berlandaskan pada pendekatan personal karena konsep Keluarga Berencana belum mendapatkan restu dari pemerintah Republik Indonesia. Pelaksanaan program KB pada masa tersebut lebih banyak dilakukan oleh keluarga dari golongan menengah ke atas. PKBI merupakan sebuah perkumpulan yang didirikan oleh golongan medis dan dokter yang memiliki kepedulian lebih besar terhadap kesejahteraan ibu dan anak.

Pada 7 September 1968, kepala negara Republik Indonesia mengumumkan Instruksi Presiden dengan nomor 26 tahun 1968, yang memberikan izin bagi pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) Nasional. Program ini dijalankan oleh berbagai elemen masyarakat yang berkolaborasi dengan pihak pemerintah, mendapatkan dukungan dan arahan dari pemerintah terkait.

Mengikuti instruksi tersebut, Menteri Kesejahteraan Rakyat kemudian mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dengan nomor 35/KPTS/Kesra/X/68 pada 11 Oktober 1968. Keputusan ini bertujuan untuk membentuk sebuah tim yang diberi tanggung jawab dalam menyusun persiapan bagi pembentukan sebuah lembaga yang fokus pada Keluarga Berencana.

Selanjutnya, pada 17 Oktober 1968, Menteri Kesejahteraan Rakyat melalui Surat Keputusan dengan nomor 30/KPTS/Kesra/X/68, resmi membentuk Lembaga KB Nasional (LKBN) sebagai wujud nyata program tersebut. LKBN diharapkan menjadi lembaga yang efektif dan efisien dalam menangani isu-isu terkait Keluarga Berencana di Indonesia, guna peningkatan kualitas hidup masyarakat.

b. Periode 1970 - 1975

Pada 29 Juni 1970, Program Keluarga Berencana secara resmi diakui sebagai Program KB Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1970. Dalam keputusan ini, dibentuklah Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebuah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang tunduk secara langsung kepada pengawasan presiden. Pelaksanaan program pada periode tersebut lebih diarahkan pada ekspansi cakupan melalui kampanye KB di berbagai media massa.

Sejak 1 Oktober 1970, Proyek Petugas Lapangan KB (PLKB) diperkenalkan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Namun, pada tahun 1972, proyek ini diambil alih oleh BKKBN dari PKBI. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua BKKBN Nomor 02/KPTS/BKKBN/I/73 yang dikeluarkan pada 8 Januari 1973, proyek PLKB kemudian dikembangkan ke daerah di luar Jawa dan Bali.

Di masa ini, pelayanan KB dilaksanakan melalui pendekatan klinik yang merupakan bagian penting dalam peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak. Selain itu, program KB mulai memperkenalkan visi pembentukan dan penanaman Norma Kecil Bahagia Sejahtera sebagai budaya baru. (NKKBS). Pola Kerja PLKB lebih banyak berperan sebagai pelaksana (workers) melalui 10 Langkah PLKB. Pada periode ini belum muncul peran serta masyarakat sebagai penggerak dan pengelola program KB, karena masih ditangani langsung para petugas lapangan KB

c. Periode 1975 - 1980

Program Keluarga Berencana telah memasuki batas baru, yaitu fase penanaman dan pengembangan yang lebih berfokus pada pelembagaan, sebagai lanjutan dari tahap sebelumnya. Dalam dimensi ini, strategi Program KB Nasional mengarah ke proses membangun dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, diterima secara luas di semua area, dan dipraktikkan dalam setiap unit keluarga.

Intensifikasi komunikasi dan komitmen memacu lahirnya model partisipasi masyarakat yang dikatalisis oleh struktur organisasi seperti Pos KB Desa, Sub Pos KB Desa, dan Kelompok Akseptor. Ini mencakup peran aktif warga dalam eksekusi Program KB Nasional mulai dari tingkat desa hingga tingkat RW dan RT. Model ini berfokus pada partisipasi dan pembentukan lembaga dengan tujuan integrasi program ke dalam kerangka struktural masyarakat. Seiring dengan peningkatan frekuensi aktivitas yang melibatkan berbagai pelaku masyarakat, maka semakin mendesak untuk merencanakan sistem dalam proses pelaksanaan program KB. Dalam periode ini, mulai dari pusat hingga kabupaten, secara organisasional dibentuk seksi Binsi (Pembinaan Institusi).

d. Periode 1980 –1990

Pelaksanaan Program KB Nasional pada periode ini mulai terbentuknya kesadaran bahwa program tidak mungkin berhasil dilaksanakan hanya oleh pihak pemerintah saja tapi diperlukan peran serta masyarakat dan tanggung jawab masyarakat. Karena itu label “Program KB Nasional” dengan konotasi KB sebagai program pemerintah menjadi label “Gerakan KB Nasional”. Dengan demikian KB merupakan gerakan masyarakat dengan bantuan teknis dari pemerintah Pada periode ini mulai ditumbuhkembangkan pola pelayanan KB Mandiri dengan penyelenggara pelayanan oleh sektor swasta dalam hal ini dokter, bidan praktek swasta.

Karena KB telah menjadi kebutuhan masyarakat maka pada periode ini pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Kemasyarakatan. Seksi Pembinaan Institusi (Bisnis) di tiap Kabupaten berubah jadi Seksi ISTA (Institusi dan Peran Serta Masyarakat).

e. Periode 1990-1999

Peneguhan institusionalisasi dari Gerakan KB Nasional menjadi semakin kokoh dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 mengenai Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Pengertian Keluarga Berencana meluas, tidak hanya terbatas pada masalah kontrasepsi, namun juga mencakup aspek lain yang lebih luas. Dalam konteks ini, Gerakan KB Nasional dikonstruksi ulang menurut Pasal 1 ayat 12 sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kepedulian dan peran masyarakat secara lebih aktif dan inklusif.

4. Kesimpulan

Melalui penyelidikan dan analisis data yang mendalam tentang dampak manajemen program Keluarga Berencana dan performa petugas lapangan dalam rangka mengevaluasi efektivitas program ini di Wilayah III Kabupaten Garut, kita dapat merumuskan beberapa simpulan sebagai berikut:

- a. Manajemen program keluarga berencana dan kinerja petugas lapangan keluarga berencana memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pencapaian program keluarga berencana di Wilayah III Kabupaten Garut. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik manajemen program keluarga berencana dan kinerja petugas lapangan keluarga berencana maka efektivitas pencapaian program keluarga berencana di Wilayah III Kabupaten Garut Semakin optimal.
- b. Ada pengaruh yang positif, meskipun moderat, antara manajemen program KB dan kinerja petugas lapangan KB di Wilayah III Kabupaten Garut. Ini memberikan indikasi bahwa peningkatan efektivitas dalam mencapai tujuan program KB di Wilayah III Kabupaten Garut berkorelasi dengan peningkatan kinerja petugas lapangan KB.
- c. Manajemen program KB memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap efektivitas pencapaian tujuan program KB di Wilayah III Kabupaten Garut. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin baik pelaksanaan manajemen program KB, ini akan mengakibatkan peningkatan dalam pencapaian tujuan program KB di Wilayah III Kabupaten Garut.
- d. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara performa petugas lapangan dalam program keluarga berencana dan efektivitas pelaksanaan program tersebut di Area III Kabupaten Garut. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kinerja petugas lapangan berhubungan langsung dengan titik efektivitas dalam mencapai tujuan program keluarga berencana di Area III Kabupaten Garut.
- e. Penemuan di lapangan menunjukkan bahwa penetapan target kerja perlu memperhitungkan dukungan dari berbagai unsur, termasuk ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang tepat. Hal ini penting agar kinerja petugas lapangan dalam implementasi program keluarga berencana di Area III Kabupaten Garut dapat disesuaikan dengan kapabilitas mereka dan mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif.

Berdasarkan analisis penelitian, aplikasi operasional studi ini menunjukkan bahwa perbaikan dalam level manajemen program keluarga berencana dan performa petugas lapangan dapat berdampak positif pada efektivitas pencapaian tujuan program ini di Wilayah III Kabupaten Garut. Seiring dengan usaha peningkatan efektivitas program ini, hukum memerintahkan pemerintah untuk memperkuat struktur manajemen program serta meningkatkan performa petugas lapangan, dan memastikan kebutuhan akan sumber daya manusia yang terlatih terpenuhi demi merealisasikan tujuan serta target yang ditetapkan oleh pemerintah.

Evaluasi terhadap efek manajemen program keluarga berencana dan performa petugas lapangan dalam program tersebut menunjukkan dampak positif terhadap efektivitas pencapaian tujuan program di Wilayah III Kabupaten Garut. Faktor kunci terletak pada kemampuan petugas lapangan dalam menetapkan dan mencapai target kerja.

Berkenaan dengan penutupan dan aplikasi hasil penelitian ini, beberapa saran yang bisa diberikan untuk pengembangan studi lebih lanjut adalah sebagai berikut:

Temuan dari pengkajian ini bisa digunakan sebagai sumber rujukan untuk studi berkelanjutan mengenai struktur manajemen program keluarga berencana, performa petugas lapangan yang terlibat dalam program, dan efektivitas pencapaian tujuan dari program keluarga berencana tersebut. Keterbatasan kemampuan analisis pada penelitian ini dapat dikembangkan lebih luas menggunakan teori-teori yang lebih relevan dan mutakhir (*up to date*) dengan cakupan populasi yang lebih besar. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengungkapkan variabel lain secara komprehensif yang tidak teramati pada penelitian ini, seperti halnya kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, efektivitas pelayanan dalam pelaksanaan kebijakan publik serta aspek lain yang belum dikaji.

- a. Dalam manajemen program keluarga berencana, pimpinan dan pegawai harus memiliki target kerja dengan tepat yang disesuaikan dengan kemampuan, kompetensi dan ketersediaan pendukung lainnya agar target kerja bisa tercapai dengan baik dan optimal.
- b. Kinerja petugas lapangan keluarga berencana di Wilayah III Kabupaten Garut harus meningkatkan kemampuan bekerja salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan dan mengikuti pendidikan formal maupun nonformal yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Efektivitas pencapaian program keluarga berencana unsur pimpinan dan petugas lapangan dapat berkoordinasi dengan petugas lain maupun dengan pimpinan agar penyelesaian tugas yang dibebankan dapat tercapai dengan maksimal.

Daftar Pustaka

- Al-Fauzi, *Keluarga Berencana Persepektif Islam dalam Bingkai Kehidupan*, JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, Vol. 3 No. 1, Maret 2017.
- Anggraini, Yunita dan Puranta, Hendra. (2010). *Administrasi Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Anthony, Robert N, dan Vijay Govindarajan. (2012). *Management Control System*. Edisi 12 Jakarta: Salemba Empat

- Ehtisham, Ahmad dkk. (2002). *Intergovernmental Grant System: Application of a General Framework to Indonesia*. IMF Working Paper No. WP/02/128. International Monetary Fund. Wosington DC.
- Hafidiah, Atin. (2010). *Evaluasi Implemenatsi Program Penyuluh Keluarga Berencana*. Tesis. Tidak diterbitkan diakses tanggal 5 Januari 2011 <http://digilib.ui.ac.id/jurnal>
- Handayaniingrat, Soewarno. (2002). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Haji
- Handoko Hani. 2007. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2013. *Manajemen sumberdaya manusia edisi revisi*. Bumi aksara:Jakarta
- Iskandar, Jusman. (2017). *Indeks dan Skala dalam Penelitian*, Bandung : Puspaga.
- Iskandar, Jusman. (2016). *Teori Sosial*, Bandung : Puspaga,
- Iskandar, Jusman. (2016). *Perilaku Manusia dalam Kelompok dan Organisasi*, Bandung : Puspaga,
- Iskandar, Jusman (2018). *Kapita Selekta Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Bandung: Puspaga,
- Iskandar, Jusman. (2017). *Metoda Penelitian Administrasi*, Bandung : Puspaga.
- Isknadar Jusman.(2014). *Manajemen Publik*, Bandung : Puspaga,
- LAN RI, (2004). *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta : LAN RI,
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*, Cetakan Pertama. Yogyakarta : UII Press.
- Maulidya, I. (2019). *Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman*. JESS (Journal of Education on Social Science), 3(2), 67-78.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik, 11(1), 1-12.
- Rudiwan, (2007), *Skala pengukuran variable-variabel penelitian*, Alfabeta : Bandung
- Rustanto, (2015), *Menangani Kemiskinan*, Bandung : Rosda,
- Syafaruddin. (2005). *Manajemen dalam oragnisasi* (Jakarta: Ciputat Press,), h. 41.
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Strategi*, Bandung : Refika Aditama,
- Siagian Sondang, (2014), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulber. (2011). *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama
- Sinambela Poltak Lijan, (2008) *Reformasi Pelayananahn Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta : Bumi Akasara.
- Sholichin, Abdul Wahab. (2008). *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi keImplementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Surahman, D. (2017). *Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja*. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, 11(2), 257-268.
- Sunggono, Bambang (1994), *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta : Sinar Gafrika
- Sutrisno, Edy. (2010) *Manajemem Sumber Daya Manusia*.Edisi Pertama .Cetakan Pertama.Jakarta:Penerbit Kencana
- Steers, Richard.M (1985). *Efektivitas Organisasi Kaidah PeriLaku*, Jakarta: Erlangga
- Syafri, Wirman. (2012). *Studi tentang Administrasi Publik*. Jatinangor : Erlangga
- Syafiie, Inu Kencana, (2006). *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Tangkilisan, Hessel Nogi. (2004). *Manajemen Publik*. Jakarta : Gramedia Widia..
- Thoha, Miftah, (2008) *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta : Kencana
- Thoha, Miftah, (1995) *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Cet II (Jakarta: Raja Grafindo Persada,), h. 8.
- Terry, Geoege.R, Leslie W.Rue (2003). *Dasar-dasar manajemen*, Jakarta: PT.Bumi Askara
- Umi Listyaningsih, dkk, (2016), *Perilaku Rumah tangga Miskin dalam Perawatan Kehamilan di Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul* - Jurnal Bumi Indonesia, 2016

WAHYUDI, E. (2020). *Implementasi Kebijakan Tentang Kepegawaian Dan Motivasi Dalam Upaya Mencapai Kinerja Pegawai Di Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung. Jurnal Industri Elektro dan Penerbangan*, 8(3).

Winardi. (2004). *Asas-asas Manajemen*, Cet III (Bandung: Alumni,) h. 4

Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat

Dokumen :

- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntabilitas Berbasis Aktual di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut
- Peraturan Bupati (PERBUP) perbup nomor 51 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2024